



Literasi Kewargaan Digital dan Pembentukan Etika Publik Siswa Madrasah Aliyah di Era Polarisasi Media Sosial

Muh. Hanif¹, Bilqis Syauqina Aqila Haqi²

¹²UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Penulis Korespondensi: bilqissyauqinaa@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the communicative and grammar-translation approaches in Arabic language learning. This research is motivated by the different orientations of the two approaches in developing students' language skills. The communicative approach emphasizes using language in real-world communication, while the grammar-translation approach focuses more on mastering grammatical rules and translating texts. This study employed a library research method with a qualitative descriptive approach. The data were obtained from various literature sources, including books, scientific journals, and previous studies related to the communicative approach, grammar-translation approach, and Arabic language learning. Data collection techniques were carried out through documentation, while data analysis was conducted by identifying, classifying, comparing, and describing data relevant to the research focus. The results of the study indicate that the communicative approach is more effective in developing speaking (kalām) and listening (istimā') skills because the learning process is oriented toward communication practices through dialogues, discussions, simulations, and other communicative activities. This approach also encourages students' active participation in the learning process. Meanwhile, the grammar-translation approach is more effective in developing reading (qirā'ah) and writing (kitābah) skills, especially in understanding academic and religious Arabic texts through grammatical analysis and translation activities.*

Based on the findings, it can be concluded that both approaches have their own strengths and limitations. Therefore, the balanced and complementary use of both approaches is considered more effective in supporting the comprehensive development of Arabic language skills.

Keywords: *public ethics; digital citizenship; Islamic high schools; social media; polarization*

Abstrak. Artikel ini dirancang untuk mengkaji “Literasi Kewargaan Digital dan Pembentukan Etika Publik Siswa Madrasah Aliyah di Era Polarisasi Media Sosial” melalui perspektif sosiologi lembaga pendidikan. Fokus utama artikel diarahkan pada klaim bahwa literasi kewargaan digital di Madrasah Aliyah penting untuk membentuk etika publik siswa agar mampu berpartisipasi di media sosial secara kritis, santun, dan tidak mudah terjebak polarisasi. Penelitian lapangan perlu ditempatkan pada sekolah, madrasah, atau pesantren yang secara empiris memperlihatkan praktik sosial terkait isu tersebut. Data utama dapat digali melalui observasi terhadap paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif, wawancara dengan aktor pendidikan yang terlibat, serta dokumentasi mengenai kebijakan, program, dan praktik kelembagaan. Tiga dimensi bukti yang perlu diuji adalah paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif, pembelajaran PAI, PPKn, dan organisasi siswa sebagai ruang internalisasi etika digital, dan kemampuan siswa membedakan kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana relasi sosial, norma kelembagaan, otoritas pendidikan, serta pengalaman siswa/guru/orang tua membentuk praktik pendidikan sehari-hari. Kontribusi artikel tidak berhenti pada deskripsi kasus, tetapi juga diarahkan untuk membangun argumentasi teoritik tentang bagaimana lembaga pendidikan bekerja sebagai arena sosial yang memproduksi kepercayaan, identitas, disiplin, solidaritas, atau perubahan sosial. Temuan yang diperoleh diharapkan memperkaya diskusi sosiologi pendidikan Islam di Indonesia dan menawarkan rekomendasi penguatan tata kelola lembaga pendidikan berbasis data lapangan.

Kata kunci: etika publik; kewargaan digital; madrasah aliyah; media sosial; polarisasi

1. LATAR BELAKANG

Pada era polarisasi media sosial, perkembangan teknologi dan kemajuan informasi berlangsung sangat cepat serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Azzahra et al., 2025). Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai platform digital seringkali digunakan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi sosial (Faidh et al., 2024). Namun, menurut Freelon & Wells (dalam Najamudin et al., 2026), platform digital juga dapat menjadi ruang penyebaran opini, ujaran kebencian, berita hoaks, serta konten politik, agama, dan sosial yang dapat memengaruhi siswa. Hal ini menjadikan bahwa berbagai platform digital tidak hanya memengaruhi perilaku siswa, tetapi juga membentuk pola pikir siswa yang kritis dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa (Hanif & Salsabillah, 2024). Oleh karena itu, madrasah aliyah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial, moral, dan etika publik peserta didik agar mampu menggunakan platform digital secara bijak dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi di MA Al-Ittihaad Purwokerto, ditemukan bahwa siswa sudah memiliki etika digital dengan dibuktikan oleh proses verifikasi informasi yang dilakukan siswa untuk memastikan kebenaran suatu kasus atau isu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan literasi kewargaan digital memiliki peran penting untuk membentuk karakter siswa yang kritis, berperilaku sosial, dan memiliki etika publik yang kuat.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai literasi kewargaan digital, etika publik, dan polarisasi media sosial namun masih cenderung bersifat normatif dan administratif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Salsabillah (2024) tentang penekanan pendidikan kewarganegaraan di era digital dalam perspektif sosialisasi politik, tetapi belum secara mendalam membahas pembentukan etika publik siswa dalam interaksi digital sehari-hari. Sementara itu, terdapat penelitian yang membahas penanaman karakter siswa melalui pendekatan sosiologi pendidikan di lingkungan sekolah berasrama, tetapi belum mengkaji pengaruh media sosial terhadap perilaku dan etika publik siswa (Nurdiansyah & Hanif, 2025). Adapun penelitian yang berfokus pada tantangan dan peluang di lingkungan sekolah mengenai implementasi pendidikan berbasis teknologi, tetapi belum secara spesifik membahas bagaimana polarisasi media sosial memengaruhi pola pikir, sikap sosial, dan perilaku siswa madrasah aliyah di ruang digital (Masngud & Hanif, 2025). Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu tersebut memiliki kaitan dengan isu literasi kewargaan digital, pembentukan karakter siswa dan etika publik, serta pengaruh polarisasi media sosial.

Artikel ini disusun untuk membahas kekurangan studi terdahulu dengan beberapa tujuan yang lebih spesifik dan berdasarkan data lapangan. Tujuan pertama penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif untuk memahami bagaimana mereka menanggapi secara kritis. Kedua, artikel ini menjelaskan tentang peran

Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), dan organisasi siswa sebagai ruang untuk menginternalisasi etika digital yang melalui proses penanaman nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam kegiatan belajar dan organisasi. Ketiga, artikel ini menilai kemampuan siswa mengenai perbedaan antara kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya melengkapi kajian normatif terdahulu, tetapi juga menyajikan bukti empiris tentang bagaimana paparan konten digital yang bersifat provokatif memengaruhi cara berpikir, sikap kritis, dan kemampuan literasi kewargaan digital siswa dalam konteks pendidikan.

Penelitian ini didasarkan pada literasi kewargaan digital di madrasah aliyah yang memiliki peran penting dalam membentuk etika publik siswa di tengah kondisi kemajuan informasi media sosial yang semakin cepat menyebar ke berbagai aspek. Dalam konteks ini, siswa tidak lagi sekadar menjadi pengguna media sosial, tetapi juga diharapkan mampu berperan sebagai masyarakat yang kritis, santun, dan bertanggung jawab dalam menanggapi berbagai konten yang beredar. Literasi kewargaan digital bukan hanya menyangkut tentang kemampuan teknis dalam menggunakan media, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, adab, dan perilaku sosial siswa agar tidak mudah terpengaruh dalam polarisasi media sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Literasi Kewargaan Digital

Pada pertemuan pakar UNESCO di Paris, literasi mengalami perluasan makna. Literasi yang awalnya hanya berkaitan dengan baca tulis, kini diperluas menjadi segenap kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomunikasikan, memperhitungkan dan menggunakan bahan-bahan cetak dan tulis yang bertautan dengan berbagai konteks (Rizal, 2022). Menurut Gilster (dalam Rizal, 2022), literasi digital memiliki definisi yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan informasi yang tidak hanya berasal dari satu sumber, yang kemudian disajikan melalui berbagai platform digital. Sedangkan literasi kewargaan digital dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memperoleh, mengolah, dan memberikan informasi kepada orang lain secara kritis dan bijak (Oktria et al., 2024). Literasi kewargaan digital menjadi salah satu aspek krusial yang berisi tentang bagaimana siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, bagaimana masyarakat dapat berinteraksi dengan orang lain di platform digital atau media sosial dan bagaimana pendapat masyarakat mengenai isu-isu, terutama isu politik, agama, dan sosial yang beredar di media sosial (Cynthia & Sihotang, 2023). Menurut Dewi (dalam Purba et al., 2025), literasi kewargaan digital tidak hanya dibentuk oleh kemampuan tiap individu, melainkan dipengaruhi dan diberikan dukungan oleh guru, organisasi siswa maupun lingkungan sekolah, yang memiliki peran dalam membimbing, membantu memahami dan membentuk norma etika digital siswa saat menggunakan media sosial.

LITERASI KEWARGAAN DIGITAL DAN PEMBENTUKAN ETIKA PUBLIK SISWA MADRASAH ALIYAH DI ERA POLARISASI MEDIA SOSIAL

Literasi kewargaan digital melibatkan berbagai aktor yang berperan penting dalam membentuk perilaku individu yang memahami dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam lingkungan pendidikan, aktor yang terlibat ialah siswa, guru, kepala sekolah, organisasi siswa, dan orang tua yang turut memengaruhi perilaku siswa (Maftukhah & Iskandar, 2025). Interaksi antaraktor tersebut dapat terlihat dalam berbagai praktik sosial seperti penggunaan media sosial untuk menyampaikan atau memperoleh informasi, pelaksanaan diskusi terkait isu publik yang beredar, serta pembiasaan semua aktor dalam hal etika komunikasi pada platform digital. Dalam pelaksanaan diskusi, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berdiskusi, memberikan pendapat pribadi, serta menanggapi isu politik, keagamaan, maupun sosial yang beredar di media sosial (Kobi et al., 2025). Pada praktiknya, interaksi yang terjadi di platform digital tersebut juga memiliki berbagai tantangan, seperti munculnya ujaran kebencian, penyebaran berita hoaks, disinformasi, dan perdebatan yang dipengaruhi oleh konten provokatif (Jannah et al., 2025). Dengan demikian, sekolah memiliki peran penting dalam mengarahkan pola komunikasi digital agar peserta didik memiliki pola pikir yang kritis, perilaku yang santun, dan menjadi pribadi yang dapat menghargai perbedaan pendapat.

2.2 Etika Publik

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Ethos” dan “Ethikos”. Ethos memiliki arti yaitu sifat, watak, kebiasaan atau tempat yang biasa. Sedangkan Ethikos dapat diartikan sebagai susila, adab, perilaku dan suatu perbuatan yang baik (Abdillah et al., 2021). Etika juga seringkali diartikan sebagai segala perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa, yang dapat berupa perbuatan baik maupun buruk (Wahyuningsih, 2022). Etika publik dapat didefinisikan sebagai nilai dan norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu agar perilaku yang diterapkan menjadi seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat (Slamet et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, etika publik menjadi salah satu hal yang penting untuk menjelaskan bagaimana sekolah—khususnya madrasah aliyah—dalam membentuk sikap, perilaku, dan cara berinteraksi antara siswa dan warga sekolah melalui berbagai aturan, pembiasaan, serta proses pembelajaran (Sulthon, 2024).

Etika publik memiliki beberapa kategori yang dapat membentuk perilaku warga sosial. Kategori yang pertama yaitu aturan formal. Aturan formal menjadi dasar pelaksanaan etika publik karena berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat melalui berbagai peraturan dan kode etik yang ditetapkan lembaga. Keberadaan aturan tersebut dapat membantu menciptakan keteraturan, tanggung jawab, dan profesionalisme sehingga dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi maupun individu (Choirulsyah & Azhar, 2024).

Kategori yang kedua yaitu kebiasaan harian. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan menjadi budaya di lingkungan sekolah, dapat memengaruhi sikap dan perilaku seluruh warga sekolah, termasuk siswa dan guru. Bentuk kebiasaan harian adalah siswa terbiasa berpamitan dan bersalaman dengan guru saat kegiatan pembelajaran selesai (Karoso et al., 2023). Kategori yang ketiga yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar turut berkontribusi dalam membentuk karakter siswa. Bentuk dukungan sosial adalah guru memberikan nasihat tentang penggunaan media sosial dengan bijak dan mengingatkan kepada siswa agar tidak terpengaruh oleh konteks provokatif (Mardatillah & Ayu, 2025). Kategori yang keempat yaitu kontrol sosial. Adanya kontrol sosial lingkungan sekolah, dapat mendorong anak-anak dalam mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Bentuk kontrol sosial adalah guru menegur siswa yang melanggar aturan atau menyalahgunakan media sosial (Sahdan et al., 2025). Kategori yang kelima yaitu respons aktor terhadap kebijakan lembaga. Kebijakan lembaga menjadi salah satu hal penting dalam membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang kritis. Bentuk kebijakan lembaga adalah mendukung penggunaan media sosial dengan bijak karena dianggap penting di era modern (Faiqah, 2018).

2.3 Polarisasi Media Sosial

Polarisasi media sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika interaksi atau perbedaan pendapat secara tajam antara kelompok-kelompok sosial atau antarpengguna media sosial, baik dalam hal ideologi, politik, budaya, atau ekonomi yang berujung pada konflik sosial (Sajian & Alif, 2025). Polarisasi digunakan untuk melihat dan menilai bagaimana praktik di lembaga pendidikan—seperti pembelajaran, aturan, dan organisasi siswa—dapat memengaruhi berbagai aspek peserta didik, seperti mutu belajar, pembentukan identitas diri, karakter, kesejahteraan psikologis, hingga peluang mobilitas sosial mereka. Di era polarisasi media sosial, peserta didik terus berinteraksi dengan berbagai informasi, opini, dan kelompok sosial di ruang digital. Proses tersebut turut memengaruhi pembentukan identitas dan etika publik mereka, karena identitas pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang berkembang melalui interaksi dan pengalaman individu (Diasworo & Hanif, 2025).

Indikator polarisasi media sosial dapat dilihat dari beberapa hal. Indikator yang pertama yaitu perubahan sikap. Terdapat tiga aspek utama yang dapat menentukan perubahan sikap atau respons manusia yaitu kognitif, afektif, dan behavioral (Ulfah et al., 2021). Menurut Bloom dalam (Ulfah et al., 2021), pemahaman konsep (kognitif) diartikan sebagai kemampuan individu dalam menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Sikap (afektif) bukan semata-mata aspek mental, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Sedangkan keterampilan proses (psikomotor) merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri

individu. Ketiganya menjadi hal yang dapat dijadikan acuan dalam melihat perubahan sikap akibat polarisasi media sosial.

Indikator yang kedua yaitu pola interaksi. Pada lingkungan sekolah, peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga terjadi berbagai bentuk interaksi sosial. Namun, pada era polarisasi media sosial terdapat perubahan pola interaksi (Kamaludin & Hanif, 2020). Perubahan ini dapat dilihat seperti halnya beberapa peserta didik lebih memilih untuk berinteraksi secara online melalui platform media sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pada peserta didik ketika dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan berinteraksi secara langsung atau tatap muka (Mussa & Situmorang, 2024).

Indikator yang ketiga adalah capaian program. Capaian program pendidikan dapat terdampak oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan siswa, terutama ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik, prasangka, atau kurangnya sikap saling menghargai. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan berbagai program sekolah yang membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif siswa. Indikator yang keempat adalah pengalaman subjektif siswa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana siswa merasakan, memahami, dan menafsirkan informasi yang mereka temui di media sosial, karena polarisasi media sosial dapat memengaruhi cara siswa memandang suatu isu, kelompok, maupun individu yang memiliki pandangan berbeda. Indikator yang kelima adalah implikasi sosial yang diamati. Hal ini mengacu pada dampak nyata yang terlihat dalam kehidupan sosial siswa sebagai akibat dari paparan berbagai informasi dan perbedaan pandangan di media sosial. Implikasi tersebut dapat berupa perubahan pola interaksi, berkurangnya keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda, munculnya kelompok-kelompok yang cenderung eksklusif, hingga meningkatnya potensi konflik dalam lingkungan pergaulan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di MA Al-Ittihaad Purwokerto, sebuah lembaga pendidikan swasta dan berada di bawah naungan yayasan Al-Ittihaad. Lokasi penelitian dipilih karena relevansinya dengan topik utama penelitian, yaitu literasi kewargaan digital dan etika publik siswa madrasah aliyah di era polarisasi media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis lapangan yang didasarkan pada metodologi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial yang terjadi secara langsung di lingkungan sekolah. Penelitian kualitatif dalam pendidikan digunakan untuk memahami pengalaman, interaksi sosial, dan praktik yang terjadi dalam konteks pendidikan secara langsung. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan sekolah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan penelitian ini. Guru dipilih sebagai sumber data berdasarkan pengalaman dalam mengajar pembelajaran PAI, PKn, maupun menjadi pembina organisasi siswa. Sedangkan siswa dipilih karena siswa merupakan subjek utama yang menggunakan platform digital, melihat dan mendiskusikan konten yang beredar di media sosial, serta mengalami proses pembentukan etika digital.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai paparan siswa terhadap konten politik, agama dan sosial yang provokatif. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan pendapat dan tanggapan guru serta siswa terkait etika dalam menggunakan media sosial/platform digital, pembelajaran PAI, PPKn, dan organisasi siswa sebagai ruang internalisasi etika digital serta kemampuan siswa membedakan kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas. Pengumpulan dokumen mencakup pengambilan foto kegiatan, pencatatan hasil wawancara, serta pengumpulan bahan-bahan lain yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini meliputi kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan dokumen. Analisis data yang pertama adalah kondensasi data. Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan temuan lainnya. Analisis data yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data berarti peneliti menyajikan data penelitian dalam berbagai bentuk seperti naratif deskriptif, gambar, tabel, bagan, transkrip wawancara, deskripsi observasi, dan dokumentasi kegiatan penelitian terkait fokus penelitian. Analisis data yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berarti peneliti menyatakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh, baik dari wawancara, dokumentasi maupun observasi. Analisis data yang terakhir adalah verifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan dokumen. Triangulasi dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari berbagai metode untuk mengkaji fenomena dari berbagai perspektif yang berbeda (Umam, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Siswa terhadap Konten Politik, Agama, dan Sosial yang Provokatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa di MA Al-Ittihaad Purwokerto beberapa kali menemukan konten politik, agama, dan sosial yang bersifat provokatif. Namun, siswa mencari kebenaran dari konten tersebut agar tidak menyebabkan disinformasi–penyebaran berita palsu. Siswa juga menjelaskan bahwa konten-konten yang bersifat provokatif dapat menimbulkan perdebatan, memecah belah masyarakat, dan dapat memicu kesalahpahaman antarmasyarakat apabila informasi tersebut langsung dipercaya tanpa diverifikasi terlebih dahulu.

LITERASI KEWARGAAN DIGITAL DAN PEMBENTUKAN ETIKA PUBLIK SISWA MADRASAH ALIYAH DI ERA POLARISASI MEDIA SOSIAL

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa ketika menggunakan media sosial, ia beberapa kali menemukan konten yang bersifat provokatif. Salah satu konten yang ia ingat adalah konten sosial provokatif berisi pembahasan seorang influencer yang sempat menjadi perbincangan publik karena kasus perselingkuhan dan berujung pada perpisahan dengan suami serta ketiga anaknya. Konten tersebut memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat, mulai dari kritik, ujaran kebencian, hingga pembelaan dari para pendukung influencer tersebut. Perdebatan yang terjadi akibat konten tersebut menyebar secara luas di berbagai platform digital dan dapat memunculkan berbagai opini di kalangan pengguna media sosial. Dalam menanggapi konten tersebut, respons informan adalah tidak langsung mempercayai informasi yang beredar, melainkan berusaha mencari informasi tambahan dari berbagai sumber media lain untuk memastikan kebenaran konten tersebut.

Konteks berlangsungnya temuan pertama tentang paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial lembaga, budaya lokal, struktur organisasi, serta tekanan eksternal. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berada dalam lingkungan masyarakat yang sarat dengan isu politik dan keagamaan, sehingga siswa secara alami terpapar pada wacana provokatif baik melalui media sosial maupun percakapan sehari-hari. Budaya lokal yang menekankan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap otoritas, dan tradisi diskusi keagamaan turut membentuk cara siswa menyikapi konten tersebut. Struktur organisasi sekolah dan organisasi siswa menyediakan ruang formal maupun informal untuk menginternalisasi nilai etika digital, sementara tekanan eksternal berupa deras arus informasi dari media sosial dan tuntutan masyarakat terhadap pembentukan karakter digital membuat paparan ini semakin relevan. Dengan demikian, paparan siswa bukan sekadar fenomena individual, melainkan bagian dari dinamika sosial yang menghubungkan lembaga, budaya, dan lingkungan eksternal dalam proses pendidikan.

4.2 Pembelajaran PAI, PKn, dan organisasi siswa sebagai Ruang Internalisasi Etika Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PAI, PKn, dan organisasi siswa di MA Al-Ittihaad Purwokerto menjadi ruang internalisasi pembentukan etika digital siswa. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pembelajaran dan organisasi siswa seringkali mengarahkan siswa untuk berdiskusi, berperilaku sopan, dan menghormati perbedaan pendapat dalam interaksi di kelas dan di sekolah. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa siswa merasa bahwa pembelajaran PAI dan PKn dapat membantu mereka dalam memahami pentingnya akhlak, adab, dan moral dalam menggunakan media sosial, seperti berhati-hati dalam berbicara, tidak

menyebarkan informasi tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu, dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital. Kemudian terdapat organisasi siswa yang berperan dalam mendorong individu untuk melakukan pembiasaan bersikap kritis, sopan, dan saling menghormati pendapat orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PAI, PPKn, dan organisasi siswa di MA Al-Ittihaad Purwokerto sebagai ruang internalisasi etika digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kebijakan sekolah yang menekankan kedisiplinan, etika dalam komunikasi di platform digital, dan sikap bijak dalam penggunaan media sosial. Hal ini diperkuat melalui komunikasi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran, di mana guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga memberikan nasihat dan mengaitkan mata pelajaran yang diampu dengan dunia digital. Hubungan kekuasaan dalam konteks ini terlihat jelas dalam peran guru sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk memahami etika bermedia sosial. Dukungan sosial dari lingkungan sekolah, teman sebaya dan pengurus organisasi siswa, juga dapat membantu siswa untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan saling menghormati dalam interaksi sehari-hari.

Hubungan antara kebijakan, komunikasi, relasi kekuasaan, dukungan sosial, dan norma-norma institusional dalam pembelajaran PAI, PPKn, dan organisasi siswa di MA Al-Ittihaad Purwokerto berlangsung dalam konteks lingkungan madrasah yang masih sangat menekankan budaya dan disiplin keagamaan. Aktor yang paling dominan dalam proses ini adalah guru PAI dan PPKn serta pembimbing organisasi siswa, yang bertindak sebagai pengarah dan pembimbing dalam pembentukan etika digital. Sementara itu, siswa merupakan subjek utama yang mengalami proses pembentukan nilai ini, dengan sebagian siswa cepat memahami dan menerapkan etika digital, sementara yang lain masih membutuhkan penguatan melalui pengenalan dan pengawasan. Dalam konteks ini, siswa yang aktif dalam organisasi cenderung lebih diuntungkan karena mereka memiliki lebih banyak ruang untuk mempraktikkan komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan organisasi atau kurang aktif dalam belajar cenderung lebih bergantung pada pengawasan guru dalam memahami etika digital. Situasi yang memperkuat proses pembentukan etika digital ini adalah integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pembelajaran dan budaya sekolah yang menekankan tata krama yang baik. Sementara faktor-faktor yang dapat melemahkannya adalah intensitas paparan media sosial yang tinggi dan kecenderungan siswa untuk mengikuti arus informasi tanpa mencari kebenaran informasi tersebut.

4.3 Kemampuan Siswa Membedakan Kritik, Ujaran Kebencian, dan Disinformasi dalam Diskusi Kelas

Temuan ketiga menunjukkan bahwa siswa mampu membedakan antara kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas. Hasil nyata terlihat dari penjelasan siswa mengenai definisi dari kritik, ujaran kebencian, dan

disinformasi saat peneliti melakukan wawancara. Definisi kritik menurut siswa adalah suatu pendapat yang bersifat membangun dan mengarah ke hal-hal yang positif. Definisi ujaran kebencian adalah perkataan yang dapat menimbulkan perdebatan seperti membully. Definisi disinformasi adalah penyebaran berita palsu akibat tidak memverifikasi suatu informasi.

Implikasi dari kemampuan ini mendorong lembaga untuk merespons dengan strategi adaptasi, negosiasi, penguatan, dan pembatasan. Adaptasi dilakukan dengan memasukkan materi tentang etika digital dalam pembelajaran PAI dan PPKn, sementara negosiasi ditampilkan saat forum organisasi siswa yang memberi ruang dialog terbuka namun tetap terarah. Penguatan diwujudkan melalui pelatihan literasi kewargaan digital dan pembiasaan siswa terkait sikap saling menghargai, sedangkan pembatasan diterapkan dengan aturan tegas terhadap siswa yang menyampaikan ujaran kebencian dan penyebaran disinformasi di lingkungan madrasah.

Nilai dari strategi tersebut adalah terciptanya komunikasi atau diskusi yang sehat dan beretika, yang dapat memperkuat mutu lembaga sebagai pusat pembentukan karakter digital. Peluang yang muncul dari strategi tersebut antara lain peningkatan keadilan sosial melalui sikap toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat, penguatan karakter siswa yang kritis sekaligus bertanggung jawab, serta keberlanjutan program pendidikan yang relevan dengan tantangan di era media sosial. Dengan demikian, kemampuan siswa membedakan kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi modal penting bagi pengembangan lembaga secara berkelanjutan.

5. DISKUSI

5.1 Makna Paparan Siswa terhadap Konten Politik, Agama, dan Sosial Yang Provokatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif memiliki kontribusi penting bagi pengembangan teori Literasi Kewargaan Digital dan praktik sosiologi pendidikan. Paparan ini memperlihatkan bagaimana interaksi digital dapat menjadi ruang pembelajaran kewargaan, di mana siswa belajar membedakan antara informasi yang valid dengan provokasi yang berpotensi memecah belah. Dari sisi sosiologi pendidikan, paparan tersebut menegaskan bahwa sekolah bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang sosial yang membentuk identitas, karakter, dan sikap kritis siswa terhadap isu publik. Dengan demikian, temuan ini dapat memperkaya pemahaman bahwa literasi kewargaan digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan juga proses sosial yang membentuk kesadaran kewargaan.

Paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif benar-benar mendukung klaim utama penelitian jika paparan tersebut diikuti

dengan proses refleksi, diskusi, dan pembiasaan nilai kritis dalam pembelajaran dan menjadi praktik administratif tanpa efek sosial signifikan. Namun, bila paparan hanya dicatat secara administratif tanpa tindak lanjut pedagogis, maka dampaknya cenderung minimal dan tidak menghasilkan perubahan sosial yang berarti. Dengan demikian, efektivitas paparan bergantung pada sejauh mana lembaga pendidikan mampu mengolahnya menjadi proses pembelajaran yang substantif, bukan sekadar formalitas dokumentasi.

5.2 Makna Pembelajaran PAI, PPKn, dan Organisasi Siswa sebagai Ruang Internalisasi Etika Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PAI, PPKn, dan organisasi siswa memiliki makna penting sebagai ruang internalisasi etika digital di lingkungan madrasah. Peran ketiga hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam membentuk etika digital siswa tidak hanya melalui aturan formal sekolah, tetapi juga melalui proses pembiasaan nilai akhlak, adab, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Kondisi ini memiliki dampak positif pada siswa yaitu lebih toleransi dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, baik dalam diskusi kelas maupun di media sosial. Dalam pembelajaran, siswa tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga belajar menerapkan nilai etika digital dalam komunikasi dan penggunaan media sosial. Sementara itu, dampak positif untuk lembaga adalah meningkatnya citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang relevan dengan era digital, karena tidak hanya menekankan aturan formal tetapi juga membiasakan nilai akhlak, adab, dan tanggung jawab dalam interaksi sehari-hari.

Temuan mengenai pembelajaran PAI, PPKn, dan organisasi siswa sebagai ruang internalisasi etika digital pada dasarnya memperkuat asumsi awal penelitian bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk etika digital siswa di era polarisasi media sosial. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pembentukan etika digital tidak sepenuhnya melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui proses pembiasaan nilai akhlak, adab, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai terhadap orang lain. Dengan demikian, penelitian ini mengubah pandangan bahwa literasi kewargaan digital bukan hanya berkaitan dengan kemampuan penggunaan media sosial/platform digital, tetapi menjadi proses pembentukan karakter, akhlak, dan kesadaran sosial dalam ruang digital.

5.3 Makna Kemampuan Siswa Membedakan Kritik, Ujaran Kebencian, dan Disinformasi dalam Diskusi Kelas

Kemampuan siswa dalam membedakan kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas menunjukkan adanya penguatan literasi kewargaan digital di lingkungan madrasah. Temuan ini memiliki dampak positif yaitu siswa tidak selalu menjadi kelompok pasif yang mudah terpengaruh oleh arus informasi digital, tetapi juga mampu bertindak sebagai subjek yang kritis dan bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan. Selain itu, kemampuan

LITERASI KEWARGAAN DIGITAL DAN PEMBENTUKAN ETIKA PUBLIK SISWA MADRASAH ALIYAH DI ERA POLARISASI MEDIA SOSIAL

tersebut memberikan dampak terhadap praktik kebijakan pendidikan, karena sekolah perlu memperkuat pembelajaran berbasis diskusi kritis, etika komunikasi digital, serta pendidikan karakter yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Hal ini penting agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan sosial dan moral dalam menghadapi dinamika ruang digital yang semakin kompleks.

Kemampuan siswa dalam membedakan kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas menunjukkan adanya perubahan sosial yang cukup mendasar, meskipun dalam tingkat tertentu masih ditemukan unsur simbolik lembaga. Perubahan mendasar tersebut terlihat dari kemampuan siswa untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi, mempertimbangkan dampak ucapan di media sosial, serta menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi. Namun, sebagian perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh budaya kedisiplinan dan aturan sekolah sehingga dalam beberapa kondisi masih bersifat normatif dan mengikuti pengawasan lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan etika digital di madrasah masih berada dalam tahap perubahan, yaitu dari kesadaran masing-masing siswa menuju kebiasaan bersama yang dibentuk oleh lingkungan sekolah.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil terpenting yang tidak mungkin diketahui tanpa penelitian lapangan adalah mekanisme sosial yang menghubungkan paparan siswa terhadap konten politik, agama, dan sosial yang provokatif dengan pembelajaran PAI, PPKn, serta organisasi siswa sebagai ruang internalisasi etika digital, hingga akhirnya membentuk kemampuan siswa dalam membedakan kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi dalam diskusi kelas. Penelitian lapangan memperlihatkan bahwa proses ini tidak berlangsung secara cepat, melainkan melalui interaksi sehari-hari, pembiasaan nilai, dan dinamika organisasi yang melibatkan guru, siswa, serta aturan kelembagaan. Mekanisme sosial tersebut hanya dapat ditangkap melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memperlihatkan bagaimana praktik kelembagaan benar-benar berperan dalam membentuk literasi kewargaan digital siswa.

Kemampuan konsep Literasi Kewargaan Digital, Etika Publik, dan Polarisasi Media Sosial terbukti relevan dalam menjawab masalah penelitian karena ketiganya memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana siswa berinteraksi dengan konten provokatif, membentuk nilai etika, dan merespons perbedaan pendapat di ruang digital maupun kelas. Literasi Kewargaan Digital menekankan aspek kritis dan tanggung jawab, Etika Publik menyoroti dimensi moral dan sosial, sementara Polarisasi Media Sosial membantu menilai dampak pemecahan komunikasi terhadap identitas dan karakter siswa. Metode studi kasus kualitatif menjadi tepat karena mampu menggali pengalaman nyata, bukti administratif, dan

dinamika sosial yang tidak bisa ditangkap oleh pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, kombinasi konsep dan metode ini memberikan jawaban komprehensif atas masalah penelitian sekaligus membuka peluang pengembangan teori dan praktik pendidikan digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah, sehingga temuan-temuannya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh Madrasah Aliyah di Indonesia. Kedua, jumlah responden terbatas pada beberapa guru dan siswa saja, sehingga data yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman seluruh komunitas sekolah. Ketiga, periode pengamatan yang relatif singkat menghalangi penelitian ini untuk melacak perubahan dalam literasi kewargaan digital dan etika publik. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan perbandingan lintas lembaga di antara lembaga pendidikan Islam, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren, untuk mengkaji Literasi Kewargaan Digital dan Pembentukan Etika Publik Siswa Madrasah Aliyah di Era Polarisasi Media Sosial. Penelitian di masa depan juga dapat mengadopsi pendekatan campuran (*mixed-methods*) untuk menggabungkan data statistik tentang literasi kewargaan digital dan etika publik dengan analisis mendalam mengenai pengalaman sosial guru dan siswa di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak MA Al-Ittihaad Purwokerto yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber, khususnya guru dan siswa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengalaman terkait literasi kewargaan digital dan pembentukan etika publik di era polarisasi media sosial. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, H. R., Arifin, Z., & Ulum, A. M. (2021). Potret Etika Era Yunani. *Jurnal Scientific of Mandalika (JSM)*, 2(12), 631–640.
- Azzahra, K., Triyanti, A., & Desi, Y. (2025). Media Sosial dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1625–1629.
- Choirulsyah, D., & Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Cynthia, R. E., & Sihotang, H. (2023). Melangkah Bersama di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31712–

31723. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12179>

- Diasworo, O., & Hanif, M. (2025). Pembentukan Identitas Diri Siswa melalui Interaksi Simbolik dalam Pembelajaran Seni Tari di SMA Diponegoro 1 Purwokerto. *VISA : Journal of Visions and Ideas*, 5(1), 327–337. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/6209/5030>
- Faidh, M. A., Maulana, M. E., Putri, N. E., Putri, I., Munir, T. A., & Laksana, A. (2024). Peran Media Sosial X Dalam Perkembangan Komunikasi Di Era Digital. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 43–51. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.433>
- Faiqah, N. (2018). Analisis Evaluatif Kebijakan Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah 2 Playen Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 18(2), 132–152. <https://doi.org/10.22373/jid.v18i2.3239>
- Hanif, M., & Salsabillah, N. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital: Perspektif Teori Sosialisasi Politik. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 11(2), 273–307. <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/749>
- Jannah, S. M., Hermawati, P. K., Sujaryanto, H., & Nuryadi, M. H. (2025). Peran Transformasi Kesadaran Kewargaan di Era Globalisasi Digital dalam Membangun Masyarakat Toleran (Studi Kasus Respons terhadap Isu Rasisme di Media Sosial). *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 2(2), 242–257.
- Kamaludin, & Hanif, M. (2020). The Implementation of Tasamuh ala Ahlussunah School in Learning Islamic Education: A Case in Ma'arif High School Purbalingga, Indonesia. *International Journal of Social Science and Religion*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i1.6>
- Karoso, S., Yanuartuti, S., Handayani, E. W., & Nuriana, E. (2023). Implementasi Budaya (Kebiasaan) Warga Sekolah SMA Antartika Sidoarjo di Dasari dengan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(4), 391–399. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i4.52>
- Kobi, I. A., Amus, S., & Purwaningsih, C. (2025). Optimalisasi Pembelajaran Aktif dengan Metode Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Partisipasi Peserta Didik pada Pembelajaran PPKn di Kelas IX SMP Negeri 1 Palu. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1299–1310. <https://doi.org/10.58822/tbq.v9i1.268>

- Maftukhah, A., & Iskandar, R. (2025). Bijak Menggunakan Sosial Media: Peran Literasi Digital dalam Mengelola Jejak Digital. *Jurnal Imiah Multidisiplin*, 2(6), 248–257. <https://doi.org/10.58822/tbq.v9i1.268>
- Mardatillah, & Ayu, S. P. (2025). Peran Dukungan Sosial dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik : Kajian Literatur. *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 133–144. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i4.52>
- Masngud, A., & Hanif, M. (2025). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Pendidikan Berbasis Teknologi di SMP Islam Andalusia Kebasen. *EduInovasi:Journal of Basic Educational Studies*, 5(1), 315–325. <https://doi.org/10.47467/edu.v5i1.6232>
- Mussa, R. A., & Situmorang, L. (2024). Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp) dan Pergeseran Pola Interaksi Sosial Mahasiswa/wi Program Studi Pembangunan Sosial Angkatan 2017 Universitas Mulawarman. *EJournal Pembangunan Sosial*, 12(2), 271–284. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2024/07/Media Sosial dan Pergeseran Pola Interaksi Sosial Mahasiswa \(Rafly\) \(07-05-24-06-11-34\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2024/07/Media_Sosial_dan_Pergeseran_Pola_Interaksi_Sosial_Mahasiswa_(Rafly)_07-05-24-06-11-34).pdf)
- Najamudin, Muliati, D., Ziliwu, A. D. W., Oktaviani, F., & Al-Nizar, M. (2026). Merespons Hoaks dan Disinformasi: Literasi Digital sebagai Bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 242–255. <https://doi.org/10.61132/karakter.v3i1.1948>
- Nurdiansyah, M. H. D., & Hanif, M. (2025). Penanaman Karakter Melalui Pendekatan Sosiologi Pendidikan pada Siswa Asrama Insan Cendekia Boarding School (ICBS) MIN 1 Banyumas. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 8(2), 87–105. <https://doi.org/10.30829/jisa.v8i2.25285>
- Oktria, A. D., Musaffa, V., & Rachman, I. F. (2024). Peran Literasi Digital dalam Membangun Kesadaran dan Moralitas Peserta Didik Sesuai dengan SDGs 2030. In *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya (MORFOLOGI)* (Vol. 2, Issue 3). <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.631>
- Purba, P. B., Ika, Simarmata, J., Lakat, J. S., Widiawati, D., Wulandari, P., Ginting, E. B., Yuniwati, I., Situmorang, P. L., Mistriani, N., Ningsih, W., Kainde, S., & Sari, W. D. (2025). *Pendidikan di Era Digital: Tantangan bagi Generasi Z* (I. M. Nadeak (ed.)). Yayasan Kita Menulis. [https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/7100/1/FullBook Pendidikan di Era Digital- Tantangan bagi Generasi.pdf](https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/7100/1/FullBook_Pendidikan_di_Era_Digital-_Tantangan_bagi_Generasi.pdf)
- Rizal, C. (2022). Pengertian Literasi Digital. In *Literasi Digital* (p. 4). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. <https://repository.upy.ac.id/4197/1/LITERASI-DIGITAL.pdf>

**LITERASI KEWARGAAN DIGITAL DAN PEMBENTUKAN ETIKA PUBLIK
SISWA MADRASAH ALIYAH DI ERA POLARISASI MEDIA SOSIAL**

- Sahdan, Bahari, Y., & C, L. M. H. (2025). Pengaruh Kontrol Sosial Guru terhadap Kedisiplinan Menaati Tata Tertib Sekolah pada Siswa SMAN 10 Pontianak. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 3729–3735.
- Sajian, A., & Alif, A. (2025). Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 4(1), 309–314. <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v3i3>
- Slamet, S. R., Daryono, G., Lelono, G., Olivia, F., Arianto, H., Puspita, A. I., Rizqi, R. C., & Aristi, F. A. (2024). Nilai dan Norma sebagai Dasar Membangun Karakter. *Jurnal Abdimas*, 10(1), 75–85. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/7012/4002>
- Sulthon, E. A. (2024). Upaya Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Menerapkan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Joedu: Jurnal of Basic Education*, 3(1), 346–366. <https://doi.org/10.66171/bd0d5v76>
- Ulfah, Arifudin, O., & Kartika, I. (2021). Pengaruh Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 2(1), 1–9. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/88/283>
- Umam, K. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar (Studi Multisitus di SD Plus Rahmat Kota Kediri dan SDN Banjaran 3 Kota Kediri)* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57512/2/19760009.pdf#page=84>
- Wahyuningsih, S. (2022). Konsep Etika dalam Islam. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 9. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/167>